



2023

(L K J i P)

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja
Kabupaten Karanganyar**

Jl. KH. Samanhudi, Komplek Perkantoran, Cangkan Karanganyar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		
DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		ii
DAFTAR GAMBAR		lii
KATA PENGANTAR		iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Gambaran Umum Organisasi	1
	1.3. Isu Strategis	4
	1.4. Dasar Hukum	4
	1.5. Sistematika Penulisan	5
BAB II	PERENCANAAN STRATEGIS	6
	2.1. Rencana Strategis	6
	2.2. Rencana Kinerja Tahunan	8
	2.3. Perjanjian Kinerja	13
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	19
	3.1. Capaian Kinerja Organisasi	19
	3.2. Realisasi Anggaran dan Efisiensi	42
	3.3. Pendapatan Asli Daerah	47
BAB IV	PENUTUP	48
	5.1. Kesimpulan	48
	5.2. Rekomendasi / Tindak Lanjut Permasalahan	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan	6
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2019-2023	7
Tabel 2.3	Tujuan Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2023	8
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja	13
Tabel 2.5	Rencana Kerja Anggaran	14
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja	19
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja	20
Tabel 3.3	Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Utama Tahun 2021- 2023	24
Tabel 3.4	Tabel Kemajuan Realisasi Sasaran Strategis	26
Tabel 3.5	Tabel Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/Kabupaten/ Kota Lain	27
Tabel 3.6	Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Tahun 2023 ...	28
Tabel 3.7	Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	33
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Tahun 2023	35
Tabel 3.9	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar	3
Gambar 3.1	Realisasi Kinerja Utama Tahun 2023	24
Gambar 3.2	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 - 2023	27
Gambar 3.3	Grafik Alokasi Anggaran Disdagperinaker 2023	35
Gambar 3.4	Grafik Realisasi dan Efisiensi Anggaran 2023	36
Gambar 3.5	Pelatihan Berbasis Kompetensi Pembuatan Roti dan Kue	40
Gambar 3.6	Pelatihan Berbasis Kompetensi Tata Kecantikan Rambut	40
Gambar 3.7	Tera/ Tera ulang UTTP Ukur Takar Timbang dan Peralatannya di SPBU	41
Gambar 3.8	Pelatihan Peningkatan Produktivitas Pelintingan dan Blending Sigaret Kretek Tangan	41
Gambar 3.9	Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	42

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kebijakan dan program yang dijabarkan melalui kegiatan, sekaligus merupakan wujud tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan. Laporan ini juga mencakup evaluasi yang dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Karanganyar, Januari 2024

KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KARANGANYAR



MARTADI, S.Sos., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19650323 198908 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan. Pelaporan ini sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, maka peran Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab Karanganyar adalah pada urusan perdagangan, perindustrian, tenaga kerja dan urusan penunjang pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar tahun 2023 yang menggambarkan pencapaian tujuan sasaran strategis selama tahun 2023 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Struktur organisasi mengalami perubahan dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja.

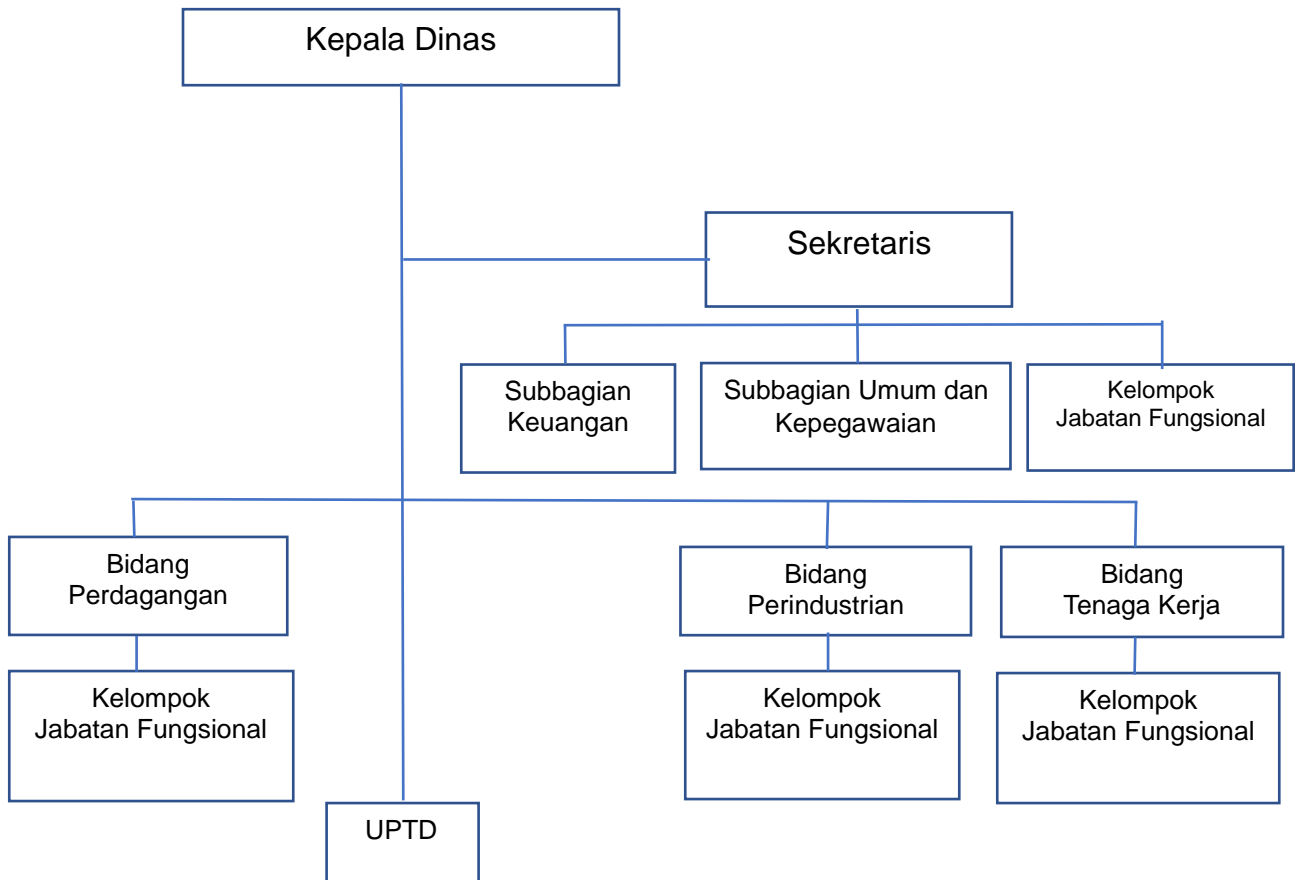
Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Disdagperinaker adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Uraian tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang tenaga Kerja,
- b. Perumusan perencanaan bidang perdagangan, bidang Perindustrian dan bidang tenaga kerja,
- c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi pengendalian fasilitasi bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja,
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja,
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas,
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis dinas,
- g. Pelaksana tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

**Bagan Susunan Organisasi
Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Karanganyar**



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar

1.3 Isu Strategis Organisasi

Sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai aspek strategis sebagai berikut :

- a. Sebagai perangkat daerah yang dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat dan lembaga-lembaga keterampilan dalam penyediaan akses dan mutu pelatihan vokasi untuk menciptakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi,
- b. Menciptakan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar kerja
- c. Peningkatan jaringan teknologi informasi dalam mendukung perkembangan produk dan informasi pemasaran secara digital,
- d. Sebagai perangkat daerah yang membina industri kecil dan menengah.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya ketersediaan lapangan pekerjaan, penyediaan tenaga kerja terampil, sarana dan prasarana peningkatan kapasitas tenaga kerja dan lembaga pelatihan kerja yang berkualitas,
- b. Belum optimalnya kepatuhan pengusaha dan pekerja terhadap peraturan perundang-undangan.
- c. Belum optimalnya sarana dan prasarana perdagangan.
- d. Belum optimalnya pengembangan sentra industri.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut.

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja ini tahun 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

- I. Pendahuluan
- II. Perencanaan Kinerja
- III. Akuntabilitas Kinerja
- IV. Penutup

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja memuat tujuan, sasaran, strategis serta arah kebijakan yang ditetapkan untuk menjamin pencapaian indikator kinerja dalam kurun waktu tertentu.

Tabel 2.1 Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya pelayanan calon tenaga kerja	Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan kerja pada masyarakat dengan status pengangguran dan pengembangan kapasitas pada angkatan kerja yang belum terampil tetapi sudah bekerja.	Pendidikan dan pelatihan pencari kerja fokus kerjasama dengan LPK-LPK yang menjadi binaan pemerintah daerah. Memfasilitasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja Melakukan kemitraan dengan perusahaan di daerah yang membutuhkan tenaga kerja terampil.
Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan	Penyediaan sarana prasarana perekonomian wilayah yang baik melalui pembangunan sarana prasarana pasar yang dikelola kabupaten yang layak	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan yang difokuskan pada pemenuhan sarana dan prasarana pasar yang dikelola kabupaten
		Peningkatan produktivitas sektor perdagangan melalui peningkatan sarana dan prasarana perdagangan (pasar rakyat yang berkualitas), Peningkatan pengawasan produk perdagangan, Peningkatan pengawasan alat ukur melalui tera dan tera ulang, peningkatan kapasitas pedagang.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan yang difokuskan pada pemenuhan sarana dan prasarana pasar tradisional, Peningkatan kualitas pengawasan produk perdagangan, dan alat ukur timbangan.
Meningkatnya produktivitas Sektor Perindustrian	Meningkatnya industri kecil dan menengah	Penyusunan Rencana Pembangunan Peningkatan penyediaan informasi industri.	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang perdagangan, perindustrian dan tenaga kerja.	Meningkatnya kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang perdagangan, perindustrian dan tenaga kerja.	Meningkatkan kinerja Sekretariat melalui dukungan administrasi Meningkatkan sarana dan prasarana Meningkatkan kemampuan aparatur yang memiliki tugas pokok dan fungsi pelaporan melalui peningkatan kapasitas Aparatur sesuai kompetensi yang dibutuhkan.	Menciptakan upaya – upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitas mengikutsertakan pelatihan bagi pegawai Sekretariat yang memadai dalam menunjang kegiatan kinerja Dinas yang dilandasi dengan komitmen dalam rangkamewujudkan tujuan dan sasaran penyediaan sarana dan fasilitas Mengadakan dan mengikutsertakan pelatihan bagi pegawai.

Sumber : Rencana Strategis Perubahan Disdagperinaker 2018-2023

Tabel 2.2 Tujuan Sasaran Indikator dan Target Tahun 2019-2023

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Na	Na	74.03	74.51	74,51
Meningkatnya pelayanan calon tenaga kerja	Rasio Angkatan Kerja yang bekerja	68.46	68.96	69.2	69.4	69,4
Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Na	Na	1.65	1.67	4,66
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan	Persentase pasar dalam kondisi baik	Na	Na	44.4	50	50
	Persentase retribusi dalam PAD	1	1.4	0.93	0.96	0,74
Meningkatnya produktivitas Sektor Perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	Na	Na	2.6	3.0	4.11
Meningkatnya industri kecil dan menengah	Pertumbuhan industri kecil dan menengah	Na	Na	29	30	32
Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang perdagangan, .96 perindustrian dan tenaga kerja.	Nilai SAKIP	61	62	70	70.5	71.26
Meningkatnya kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang perdagangan,	Nilai IKM	80	82	87	88	82

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Tahun				
perindustrian dan tenaga kerja.						

2.2 . Rencana Kinerja Tahunan

Tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja akan diwujudkan dalam program dan kegiatan di tahun 2023 sebagaimana berikut:

Tabel. 2.3 Tujuan Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan menengah.	Meningkatnya kinerja perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan menengah.		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70
		Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Penyediaan Gaji dan tunjangan	
		Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ Semesteran SKPD	
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	
		Pengolahan Data Retribusi Daerah	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.			
Sosialisasi Peraturan			

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		
		Perundang- Undangan			
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
		Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
		Penata usahaan arsip dinamis pada SKPD			
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
		Pengadaan Mebel			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
		Meningkatkan perluasan penempatan tenaga kerja	Meningkatnya pelayanan tenaga kerja, calon tenaga kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	70%
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja makro	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	30%		
		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan			

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
		Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
		Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
		Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	
		Penyediaan Sumber Daya Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	
		Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaaa Kecil	
		Pelaksanaan Konsultasi produktivitas pada Perusahaan kecil	
		Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tingkat daerah kabupaten /kota	
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	57%
		Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	
		Penyediaan Sumber daya Pelayanan antar Kerja	
		Pelayanan Antar Kerja	
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.	
		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
		Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
		Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
		Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	100%
		Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
		Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
		PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	30%
		Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
		PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG	
		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	55.55%
		Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
		PROGRAM PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	27.78%
		Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
		Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	50 produk
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	27%
		Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	15 produk
		Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	33%
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	20%
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	

Sumber: DPA Disdagperinaker 2023

2.3. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar pada menyusun perjanjian kinerja pada tahun 2023.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Instansi Pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian.

Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Tahun 2023
			Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	74,51
2	Meningkatnya pelayanan calon tenaga kerja	Rasio Angkatan Kerja yang bekerja	69,4
3	Meningkatnya produktivitas Sektor Perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	4,66
4	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan	Persentase pasar dalam kondisi baik	50
		Persentase retribusi dalam PAD	0,74
5	Meningkatnya produktivitas Sektor Perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	4.11
6	Meningkatnya industri kecil dan menengah	Pertumbuhan industri kecil dan menengah	32
7	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang perdagangan, perindustrian dan tenaga kerja	Nilai SAKIP	71.26
8	Meningkatnya kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang perdagangan, perindustrian dan tenaga kerja	Nilai IKM	82

Sumber : Rencana Strategis Perubahan Disdagnakerkop UKM Perubahan 2018-2023

Pencapaian kinerja kegiatan harus didukung dengan anggaran yang mencukupi. Anggaran belanja Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja pada setiap program adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Rencana Kerja Anggaran pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		22.860.415.605
	Penyusunan dokumen perencanaan pengangkatan daerah	2 dokumen	24.000.000
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD	1 dokumen	4.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 dokumen	3.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan		
	Koordinasi Penyusunan DPA- SKPPD	1 dokumen	2.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPPD	1 Dokumen	2.000.000
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar Relasasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	5.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	134 ASN	10.640.183.705
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKDP	12 Laporan	10.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKDP	1 Dokumen	8.000.000
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1 dokumen	6.457.000
	Pengolahan Data Retribusi Daerah	12 laporan	4.003.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	32 orang	62.400.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		153.053.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	15.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	17.920.000

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	349.500.000
	Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Paket	90.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	226.370.000
	Dukungan Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKDP		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	26 Dokumen	2.600.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21 unit	525.000.000
	Pengadaan Mebel	1 Paket	20.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	118.100.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	6.000.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	1 Paket	40.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.562.609.600
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	3.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	361.300.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	187 Orang Thl, 50 Satpam, Alat Kebersihan 1 Paket	3.520.722.500
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 unit	152.632.000
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bnagunan Lainnya.	4 Gedung	152.632.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	2 paket	243.671.000
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		10.000.000
	Penyusunan Tenaga Kerja makro	1 pertemuan	10.000.000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		3.094.540.500
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	326 Orang	3.060.540.500
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	57 lembaga	30.000.000

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran
	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		
	Penyediaan Sumber Daya Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	7 orang, 3 LPK	2.000.000
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan kecil	1 Perusahaan	1.000.000
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tingkat daerah Kabupaten/Kota		
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 perusahaan	5.000.000
3. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota		125.000.000
	Penyediaan Sumber daya Pelayanan antar Kerja	16 Orang	25.000.000
	Pelayanan Antar kerja	12 bulan	8.000.000
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	100 Orang	12.000.000
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		30.000.000
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	12 bulan	30.000.000
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		75.000.000
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	60 Orang	12.000.000
	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	8.000.000
4. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			205.000.000
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	1 sosialisasi, 2 sidang	15.000.000
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		
	Pencegahan Perselisihan	20 Perusahaan	55.000.000

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran
	Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	1 Lembaga	100.000.000
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	20 Perusahaan	10.000.000
PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN dan PENDAFTARAN PERUSAHAAN			21.583.400
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	7 Dokumen	15.726.700
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	7 dokumen	5.856.700
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			733.971.600
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 pasar	71.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Anggaran	18 Pasar	508.854.000
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	18 Pasar	40.000.000
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			20.093.200
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	5 Laporan	7.651.700
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			16.961.100
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	42 Pelaku	16.961.100
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			42.736.000
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	1.900 UTTP	42.736.000
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			409.404.000
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	45 UKM	409.404.000
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			614.600.200
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.	240 Orang	614.600.200
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			15.000.000
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.		
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/kota melalui SIINAS		15.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

5.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan capaian kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut.

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	≥ 85 – 100%	Baik
3	≥ 65 – 85 %	Cukup
4	≥ 50 – 65%	Kurang
4	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang

1. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalama mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab Karanganyar Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	74.51	70.69	94.87	Baik	
2	Meningkatkan pelayanan calon tenaga kerja	Rasio Angkatan Kerja yang bekerja	69.40	67.60	97.40	Baik	
3	Meningkatkan produktivitas sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	4.63	4.66	100.65	Sangat Baik	
4	Meningkatnya kualitas sarana prasarana perdagangan	Persentase pasar dalam kondisi baik	50	50	100	Baik	
		Persentase retribusi dalam PAD	0.74	0.82	110.8	Sangat Baik	
5	Meningkatkan produktivitas sektor perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	4.11	5.83	141.85		
6	Meningkatnya industri kecil dan menengah	Pertumbuhan industri kecil dan menengah	32	32	100	Baik	
7	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi bidang Perdagangan, perindustrian dan tenaga kerja	Nilai SAKIP	71.26	71.25	99.9	Baik	
8	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi bidang Perdagangan, perindustrian dan tenaga kerja	Nilai IKM	82	81.75	99.6	Baik	

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar 2023 terdapat Pengangguran Terbuka sejumlah 23.117 orang, Angkatan kerja sejumlah 531.203 orang dan bukan Angkatan kerja 220.262 orang. Angkatan kerja yang bekerja sejumlah 508.086 orang. Total Angkatan kerja dan bukan Angkatan kerja adalah 751.465 orang.

Capaian Kinerja indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2023 termasuk dalam kategori **baik**, yaitu 94.87%. Tingkat partisipasi Angkatan kerja merupakan perbandingan antara jumlah Angkatan kerja dengan jumlah total Angkatan kerja dan bukan Angkatan kerja sehingga diperoleh nilai TPAK sebesar 70.69.

Capaian kinerja rasio Angkatan kerja yang bekerja termasuk dalam kategori **baik**, yaitu 97.40%. Rasio Angkatan kerja yang bekerja merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan Angkatan kerja yang bekerja. Pada tahun 2023 terdapat 508.086 orang yang bekerja, dan 23.117 orang yang merupakan pengangguran terbuka. Jumlah orang yang bekerja tersebut dibandingkan dengan jumlah orang yang merupakan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, sejumlah 751.465. Sehingga rasio Angkatan kerja yang bekerja tahun 2023 adalah 67.40.

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah laju pertumbuhan pertumbuhan ekonomi wilayah dari tahun t-1 ke tahun t. Laju pertumbuhan PDRB memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa.

Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan pada tahun 2023 di Kabupaten Karanganyar adalah 4.66. Target PDRB sektor perdagangan tahun 2023 adalah 4.63. Capaian kinerja adalah 100.65%, kategori **sangat baik**. Dari nilai laju pertumbuhan PDRB 2023 ini dapat diartikan bahwa pada tahun 2023 pertumbuhan PDRB mengalami pertumbuhan positif.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar didukung oleh ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana perdagangan, salah satu diantaranya adalah pasar rakyat. Kabupaten Karanganyar memiliki 18 (delapan belas) pasar rakyat. Yaitu Pasar Malangjiwan, Pasar Tuban, Pasar Palur, Pasar Nglano, Pasar Jongke, Pasar Tegalgedhe, Pasar Kebakkramat, Pasar Karangpandan, Pasar Belang, Pasar Tawangmangu, Pasar Kemuning, Pasar Kwadungan, Pasar Matesih, Pasar Mojogedang, Pasar Jambangan, Pasar Jatipuro, Pasar Jumapolo, Pasar Punukan. Pasar tersebut tersebar di seluruh wilayah kecamatan, namun Kecamatan Jumantono dan Jenawi tidak memiliki pasar rakyat.

Pada tahun 2023 kondisi pasar dalam keadaan baik ada 9 (Sembilan) pasar rakyat, yaitu pasar Malangjiwan, Pasar Tuban, Pasar Nglano, Pasar Matesih, Pasar Palur, Pasar Jambangan, Pasar Tegalgedhe, Pasar Tawangmangu dan Pasar Karangpandan.

Capaian kinerja Tahun 2023 adalah 100%, atau sesuai target yang ditetapkan yaitu 9 (Sembilan) pasar rakyat dalam kondisi baik. Namun demikian, kondisi pasar rakyat di Kabupaten Karanganyar sangat memerlukan perhatian, khususnya dalam hal pembangunan maupun pemeliharaan fisik pasar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Salah satu sumber PAD adalah Retribusi yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.

Retribusi sektor perdagangan diperoleh dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan tera/ tera ulang, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat parkir khusus, dan retribusi perpanjangan IMTA.

Pada Tahun 2023 Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar mampu memberikan pendapatan retribusi sebesar Rp. 3.649.491.426,- (Tiga milyar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), dengan target pada pendapatan retribusi perangkat daerah sebesar Rp. 3.475.457,- (Tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2023 adalah Rp. 441.824.704.329,- (Empat ratus empat puluh satu milyar deapan ratus dua puluh empat ribu tujuh rats empat ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah). Kontribusi retribusi terhadap PAD sebesar 0.82. Capaian kinerja persentase retribusi dalam PAD adalah 110% melebihi dari target yang ditetapkan, sehingga termasuk kategori **sangat baik**. Pungutan retribusi di seluruh pasar rakyat dioptimalkan dengan layanan e-retribusi. Layanan e-retribusi baru dilaksanakan di Pasar Nglano dan Pasar Matesih. Selain pasar, sasaran pungutan retribusi adalah di Rusunawa, sewa plaza palur, perpanjangan IMTA dan sewa tanah sawah.

Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan pada tahun 2023 di Kabupaten Karanganyar adalah 5.83. Target PDRB tahun 2023 adalah 4.11 Capaian kinerja adalah 141.85 %, atau kategori **sangat baik**. Dari nilai laju pertumbuhan PDRB 2023 ini dapat diartikan bahwa pada tahun 2023 pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan positif.

Pertumbuhan industri kecil dan menengah pada tahun 2023 terdapat 2572 industri kecil menengah baru. Pada tahun 2022 jumlah industri kecil menengah aadalah 1945. Realisasi pertumbuhan industri kecil dan menengah adalah 32.23%.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari system perencanaan, sistem penganggaran dan system pelaporan kinerja, yag selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Implementasi Sakip di perangkat daerah dievaluasi terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja serta pelaporan. Pelaksanaan kinerja diawali dari penerapan pohon kinerja dan cascading.

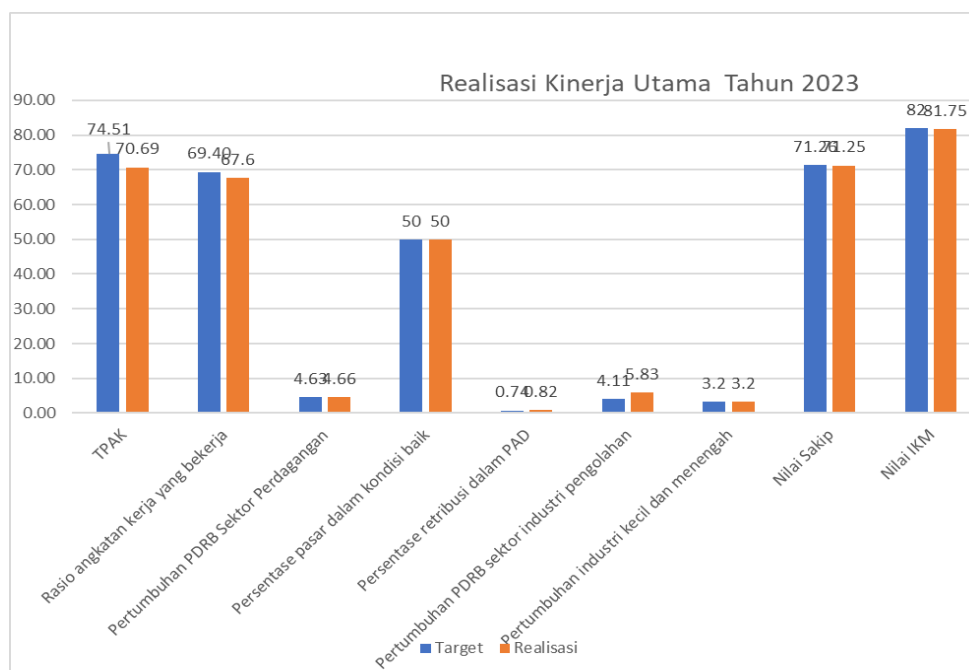
Penerapan cascading memungkinkan pencapaian output dan outcome dapat tercapai.

Pada tahun 2023 realisasi nilai Sakip adalah 71.25, sehingga capaian nilai Sakip sebesar 99.9% kategori **baik** Berdasarkan penilaian Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah meningkatkan kualitas rumusan hasil (Tujuan/ Sasaran) agar jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, memperbaiki target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja sehingga dapat dicapai, menantang, realistis serta agar setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pada tahun 2023 realisasi IKM sebesar 81.75 sehingga capaian IKM sebesar 99.6% kategori **baik**. Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan melalui survei secara daring meliputi indikator persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana serta penanganan aduan. Hal yang perlu diperhatikan untuk perbaikan selanjutnya adalah sarana dan prasarana.

Gambaran capaian indikator kinerja utama Dinas Perdagangan perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 tertera pada grafik berikut.



Gambar 3.1 Realisasi Kinerja Utama Tahun 2023

1. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022 dan 2023

Target kinerja utama pada perangkat daerah direncanakan selalu naik, dengan tolok ukur adanya peningkatan kualitas hasil kinerja. Pemantauan perkembangan capaian target dalam tiga tahun terakhir didasarkan dengan ditetapkannya RPJMD Perubahan Kabupaten Karanganyar tahun 2018 – 2023.

Hasil realisasi indikator kinerja utama Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar 2021 – 2023 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Utama Tahun 2021- 2023

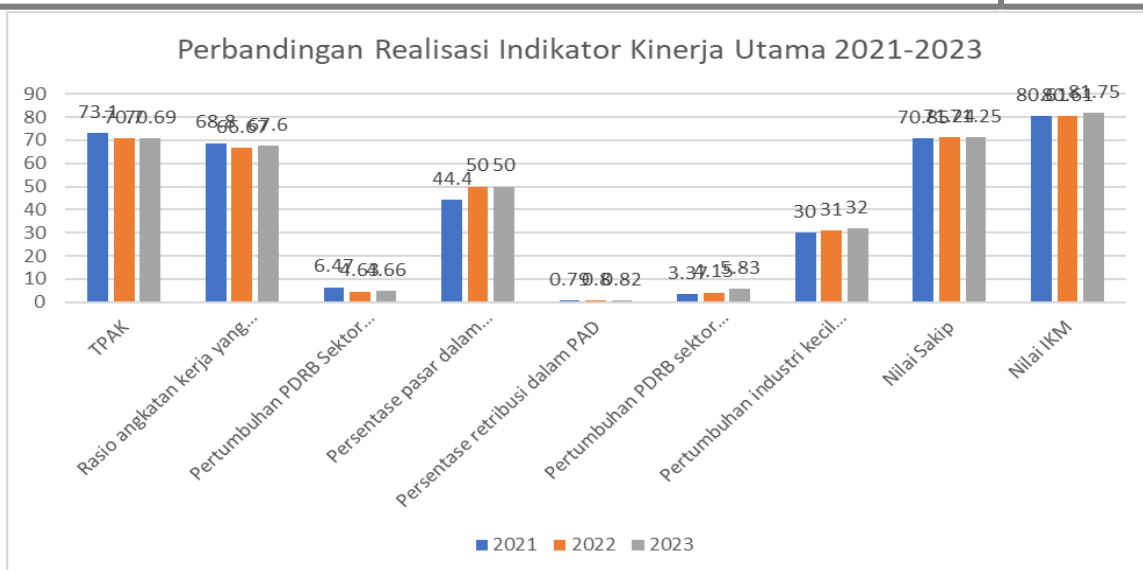
No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		2023			
			Targ et	Realisa si	Capai an	Targ et	Realisa si	Capai an	Targ et	Realisa si	Capai an
1	Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	74.03	73.1	98.7	74.51	70.7	94.88	74.51	70.69	94.87
2	Meningkatkan pelayanan calon tenaga kerja	Rasio Angkatan Kerja yang bekerja	69.20	68.8	99.42	69.4	68.7	98.99	69.40	67.60	97.40
3	Meningkatkan produktivitas sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	1.65	6.47	392.12	1.67	4.63	277.84	4.63	4.66	100.65
4	Meningkatnya kualitas sarana prasarana perdagangan	Persentase pasar dalam kondisi baik	44.4	44.4	100	50	44.4	88.88	50	50	100
		Persentase retribusi dalam PAD	0.93	0.79	84.94	0.96	0.80	83.33	0.74	0.82	110.8
5	Meningkatkan produktivitas sektor perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan		3.37			4.15		4.11	5.83	141.85
6	Meningkatnya industri kecil dan menengah	Pertumbuhan industri kecil dan menengah		30			31		32	32	100
7	Meningkatkan kualitas	Nilai SAKIP	70	70.85	101.2	70.5	71.24	101.0	71.2	71.25	99.9

	perencanaan, pengendalian dan evaluasi bidang perdagangan, perindustrian dan tenaga kerja				1			5	6		
8	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi bidang perdagangan, perindustrian dan tenaga kerja	Nilai IKM	82	80.61	98.30	88	80.61	91.60	82	81.75	99.6

Realisasi indikator kinerja Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar pada tahun 2021 hingga tahun 2023 mengalami dinamika perubahan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2021 hingga tahun 2023 cenderung mengalami penurunan. Rasio angkatan kerja yang bekerja juga cenderung mengalami penurunan. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan pada tahun 2022 menurun dibanding tahun 2021, namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Persentase pasar dalam kondisi baik cenderung mengalami peningkatan. Dalam periode tiga tahun, telah diupayakan pemeliharaan pasar rakyat. Persentase retribusi dalam PAD cenderung mengalami peningkatan, Pungutan retribusi telah dioptimalkan di seluruh objek retribusi.

Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan cenderung mengalami peningkatan.

Perkembangan realisasi indikator kinerja utama tahun 2021-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2021-2023

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Akhir RPJMD

Tahun 2023 merupakan tahun akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023. Pada tahun terakhir diperhitungkan indikator kinerja dapat mencapai target yang direncanakan. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 terhadap akhir tahun RPJMD tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3. 4 Tabel Kemajuan Realisasi Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70.69	74.51	94.87
2	Meningkatkan pelayanan calon tenaga kerja	Rasio Angkatan Kerja yang bekerja	67.60	69.40	97.40
3	Meningkatkan produktivitas sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	4.66	4.63	100.65
4	Meningkatnya kualitas sarana prasarana perdagangan	Persentase pasar dalam kondisi baik	50	50	100
		Persentase retribusi dalam PAD	0.82	0.74	110
5	Meningkatkan produktivitas sektor perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	4.11	5.83	141.85
6	Meningkatnya industri kecil dan menengah	Pertumbuhan industri kecil dan menengah	32	32	100

7	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi bidang perdagangan, perindustrian dan tenaga kerja	Nilai SAKIP	71.25	71.26	99.9
8	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi bidang perdagangan perindustrian dan tenaga kerja	Nilai IKM	81.75	82	99.6

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), rasio Angkatan kerja yang bekerja, Nilai Sakip dan Nilai IKM dalam kategori **baik** namun tidak/ belum bisa 100% memenuhi besaran target. Persentase pasar dalam kondisi baik, persentase retribusi dalam PAD, pertumbuhan PRDB sektor perdagangan, Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, pertumbuhan industri kecil dan menengah dalam kategori **sangat baik**, dan mampu mencapai target sesuai yang direncanakan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Utama Kabupaten dengan Provinsi

Realisasi kinerja utama kabupaten perlu dibandingkan dengan capaian provinsi, untuk mengetahui sejauh mana kontribusi kinerja kabupaten dengan provinsi. Perbandingan realisasi kinerja kabupaten dibandingkan dengan provinsi Jawa Tengah tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3. 5 Tabel Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/Kabupaten/ Kota Lain

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kabupaten	Jawa Tengah	% Capaian
1	Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70.69	71.72	98.56%
2	Meningkatkan produktivitas sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	4.66	5.29	88.09%
3	Meningkatkan produktivitas sektor perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	5.83	3.21	181.61%

Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karanganyar tahun 2023 lebih rendah dari realisasi di Jawa Tengah, dengan capaian 98.56%. Realisasi Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023

lebih rendah dibandingkan realisasi di Jawa Tengah, dengan capaian 88.09%. Realisasi pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan tahun 2023 di Kabupaten Karanganyar lebih tinggi dibanding realisasi di Jawa Tengah, dengan capaian 181.61%

5. Analisis Keberhasilan Kegagalan dan Solusi 2023

Dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023, dapat terjadi permasalahan atau kendala yang dapat mengakibatkan terhambatnya kegiatan sehingga memungkinkan tidak tercapainya target sesuai yang ditetapkan. Identifikasi keberhasilan maupun kegagalan tertera pada tabel berikut.

Tabel 3.6. Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /kegagalan	Solusi
1	Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	74.51	70.69	94.87	Kategori capaian baik, Penyebab : Perangkat daerah aktif memberikan informasi lowongan kerja, memfasilitasi pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dari dunia usaha dunia industri, meningkatkan kualitas kurikulum Lembaga pelatihan, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan berbasis kompetensi, melaksanakan pendampingan untuk menumbuhkan minat kerja di usia muda.	Meningkatkan kualitas pelatihan berbasis kompetensi, meningkatkan fasilitasi untuk penempatan tenaga kerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /kegagalan	Solusi
2	Meningkatkan pelayanan calon tenaga kerja	Rasio Angkatan Kerja yang bekerja	69.40	67.60	97.40	<p>Kategori capaian baik.</p> <p>Penyebab :</p> <p>Perangkat daerah aktif memberikan informasi lowongan kerja, memfasilitasi pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dari dunia usaha dunia industri, meningkatkan kualitas kurikulum Lembaga pelatihan, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan berbasis kompetensi, melaksanakan pendampingan untuk menumbuhkan minat usia produktif untuk bekerja.</p>	<p>Meningkatkan kualitas pelatihan berbasis kompetensi, meningkatkan fasilitasi untuk penempatan tenaga kerja</p>
3	Meningkatkan produktivitas sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	4.63	4.66	100.64	<p>Kategori capaian sangat baik.</p> <p>Penyebab:</p> <p>Situasi ekonomi pasca covid telah membaik, Perangkat daerah memfasilitasi kegiatan untuk meningkatkan daya beli dengan mempromosikan produk unggulan, pendampingan pelaku ekspor untuk meningkatkan</p>	<p>Meningkatkan kualitas produk unggulan daerah</p> <p>Meningkatkan kualitas barang dan peluang ekspor</p> <p>Meningkatkan fasilitasi promosi produk unggulan</p>

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Targe t	Realisa si	% Capaia n	Analisis Keberhasilan /kegagalan	Solusi
						kualtas produk. Perangkat daerah aktif memfasilitasi munculnya produk unggulan.	
4	Meningkatnya kualitas sarana prasarana perdagangan	Persentase pasar dalam kondisi baik Persentase retribusi dalam PAD	50 0.74	50 0.82	100 110.8	Kategori capaian sangat baik Penyebab : Perangkat daerah melakukan pemeliharaan atas pasar rakyat, dan melakukan koordinasi aktif dengan pengelola sarana Kategori capaian sangat baik. Penyebab : Kesadaran masyarakat yang baik dalam melaksanakan kewajiban membayar retribusi. Petugas penarik retribusi sangat aktif melaksanakan tugasnya. Selalu dilaksanakan monitoring dan evaluasi atas pencapaian retribusi.	Meningkatkan fasilitas pemeliharaan pasar rakyat Meningkatkan penerimaan retribusi
5	Meningkatkan produktivitas sektor perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	4.11	5.83	141.85	Kategori capaian sangat baik Penyebab Meningkatnya aktivitas	Meningkatkan kualitas produk industri kecil

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /kegagalan	Solusi
						ekonomi sektor industri pengolahan.	
6	Meningkatnya industri kecil dan menengah	Pertumbuhan industri kecil dan menengah	32	32	100	<p>Kategori capaian sangat baik.</p> <p>Penyebab:</p> <p>Perangkat daerah aktif melaksanakan fasilitasi pendampingan pemberdayaan industri dan pemberdayaan masyarakat. Melaksanakan pelaporan informasi industri dengan baik</p>	Meningkatkan fasilitasi pembentukan industri kecil
7	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi bidang perdagangan perindustrian dan tenaga kerja	Nilai SAKIP	71.26	71.25	99.9	<p>Kategori capaian baik.</p> <p>Penyebab :</p> <p>Perangkat daerah berupaya meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan pemantauan pengukuran kinerja, melaksanakan pelaporan kinerja, melakukan evaluasi internal atas pencapaian kinerja.</p>	<p>Meningkatkan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan</p> <p>Meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan</p> <p>Meningkatkan mitigasi risiko dan dampak pada kegiatan</p>
8	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi bidang perdagangan perindustrian dan tenaga kerja	Nilai IKM	82	81.75	99.6	<p>Kategori capaian baik.</p> <p>Penyebab :</p> <p>Perangkat daerah senantiasa meningkatkan layanan terhadap masyarakat dalam hal pemenuhan</p>	Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat sesuai jenis layanan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /kegagalan	Solusi
						indikator persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana serta penanganan aduan.	

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan suatu masalah, harus dicari penyebab permasalahan tersebut kemudian ditetapkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Namun jika tidak ditemui kendala, tetap diperlukan solusi untuk lebih meningkatkan realisasi capaian.

Pada tahun 2023 tidak ditemui kendala yang berarti, sehingga realisasi kegiatan dapat berjalan lancar dan realisasi dapat memenuhi sesuai target.

6. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran Tahun 2023

Pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah memerlukan besaran anggaran agar dapat berjalan dengan baik. Kinerja anggaran merupakan capaian kinerja atas segala yang berkaitan dengan kegiatan keuangan pada suatu institusi pada periode tertentu. Tingkat efisiensi anggaran merupakan ukuran suatu keberhasilan dari suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Besaran anggaran pada tiap indikator kinerja utama (tujuan dan sasaran strategis) Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2023 serta tingkat efisiensi tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

	Indikator Kinerja				Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70.69	94.87	3.434.540.500	3.354.641.750	97.67%	2.33%
2	Meningkatkan pelayanan calon tenaga kerja	Rasio Angkatan Kerja yang bekerja	67.60	97.40				
3	Meningkatkan produktivitas sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan			1.244.749.300	1.231.256.902	98.92%	1.08%
4	Meningkatnya kualitas sarana prasarana perdagangan	Persentase pasar dalam kondisi baik Persentase retribusi dalam PAD	50 0.82	100 110.8				
5	Meningkatkan produktivitas sektor perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan			629.600.200	617.064.175	98.01%	1.99%
6	Meningkatnya industri kecil dan menengah	Pertumbuhan industri kecil dan menengah	32	100				
7	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi bidang perdagangan perindustrian	Nilai SAKIP	71.25	99.9	22.860.415.605	20.798.446.160	90.9%	9.01%

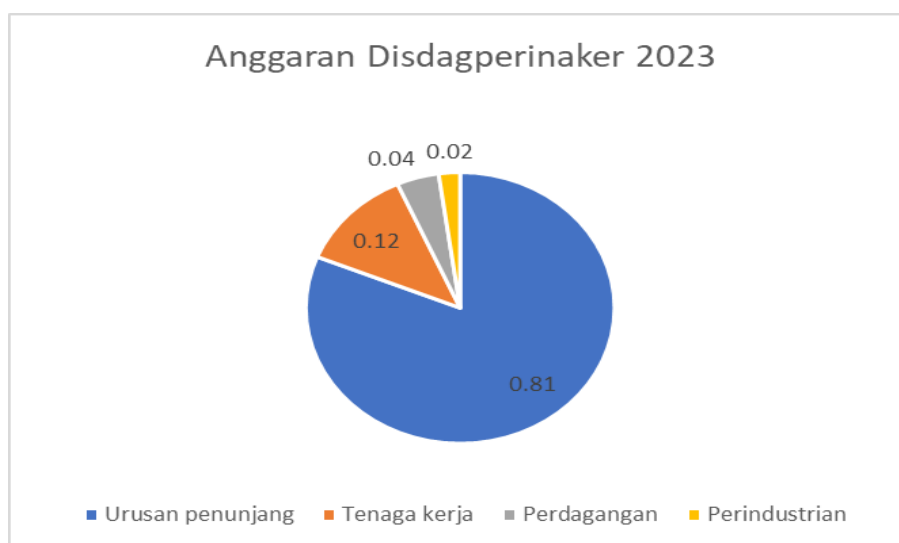
	dan tenaga kerja							
8	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi bidang perdagangan perindustrian dan tenaga kerja	Nilai IKM	81.75	99.6				

Tingkat efisiensi anggaran belanja merupakan ukuran sebuah keberhasilan dari suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi penggunaan anggaran Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab Karanganyar dilakukan dengan mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran, memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah.

Mengurangi pemborosan atrinya pada saat penyusunan anggaran, penetapan kebutuhan barang dan jasa hanya untuk barang dan jasa yang benar-benar diperlukan dan sesuai untuk pelaksanaan kegiatan. Perangkat daerah melakukan pengawasan intern dan pemantauan agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.

Proses pengadaan barang jasa merupakan hal penting. Hal ini diawali dari penyusunan SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). Pada saat ini ditentukan metode pengadaan sehingga diharapkan pelaksanaan berjalan efisien. Yang terpenting adalah proses monitoring dan pengawasan atas penggunaan anggaran.

Proporsi alokasi anggaran pada setiap urusan yang menunjang pencapaian indikator kinerja utama sesuai pada grafik berikut.

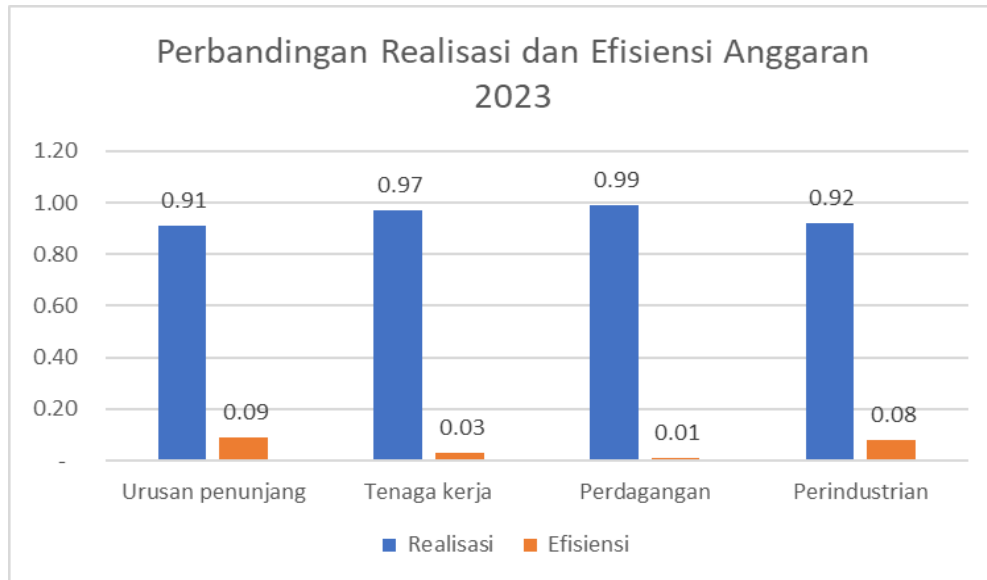


Gambar 3.3 Grafik Alokasi Anggaran Disdagperinaker 2023

Anggaran untuk urusan penunjang urusan pemerintahan mendapat jumlah yang lebih besar dibanding urusan perdagangan, perindustrian dan tenaga kerja. Urusan

perindustrian mendapat alokasi anggaran yang paling sedikit. Urusan penunjang urusan pemerintahan termasuk didalamnya untuk gaji dan tunjangan ASN.

Realisasi anggaran dan efisiensi serapan anggaran tergambar pada grafik berikut.



Gambar 3.4 Grafik Realisasi dan Efisiensi Anggaran 2023

Sesuai grafik di atas diketahui bahwa serapan anggaran di semua urusan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama, terserap lebih dari 90% anggaran. Efisiensi tercatat kurang dari 10%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian target indikator kinerja utama Disdagperinaker 2023.

7. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan 2023

Upaya pelaksanaan indikator tujuan dan sasaran Disdagperinaker 2023, didukung dengan program dan target capaian yang telah ditetapkan. Analisis keberhasilan program dan kegiatan tertera pada tabel berikut.

Tabel 3. 8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70.69				
2	Meningkatkan pelayanan calon tenaga kerja	Rasio Angkatan Kerja yang bekerja	67.60				
				Program Pelatihan Kerja Dan	Persentase ketersediaan tenaga	25%	menunjang

				Produktivitas Tenaga Kerja	kerja yang terampil dan terlatih		
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	55%	menunjang
				Program Hubungan Industrial	Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	100%	menunjang
3	Meningkatkan produktivitas sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	4.66				
4	Meningkatnya kualitas sarana prasarana perdagangan	Persentase pasar dalam kondisi baik Persentase retribusi dalam PAD	50% 0.82				
				Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	35%	menunjang
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar dalam kondisi baik	50%	menunjang
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase sarana perdagangan yang memiliki informasi harga	16%	menunjang
				Program Pengembangan Ekspor	Jumlah pelaku ekspor	50	menunjang
				Program Standardisasi Dan	Persentase alat timbang yang ditera	60%	menunjang

				Perlindungan Konsumen	ulang		
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah produk lokal yang telah difasilitasi dalam kemitraan pameran	100 produk	menunjang
5	Meningkatkan produktivitas sektor perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	4.11				
6	Meningkatnya industri kecil dan menengah	Pertumbuhan industri kecil dan menengah	32%				
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Prosentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah baru	32%	menunjang
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah industri yang dilaporkan		menunjang
7	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi bidang tenaga kerja, perdagangan dan tenaga kerja	Nilai SAKIP	71.25				
8	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi bidang tenaga kerja, perdagangan dan tenaga kerja	Nilai IKM	81.75				

				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP	71.25	menunjang
--	--	--	--	--	-------------	-------	-----------

Capaian indikator tujuan dan sasaran Disdagperinaker 2023 didukung oleh berjalannya program kegiatan secara efektif. Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Rasio Angkatan Kerja yang Bekerja didukung oleh berjalannya Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Hubungan Industrial. Aktivitas yang dilakukan selalu dipantau dan dimonitoring agar mencapai output yang direncanakan. Aktivitas yang dilaksanakan adalah Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Pelayanan antar Kerja., Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja, Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online, Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan, Persentase pasar dalam kondisi baik dan Persentase Retribusi dalam PAD didukung oleh Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspo,r Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Program tersebut didukung aktivitas Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang, Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.

Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan, Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah didukung oleh Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. Aktivitas yang mendukung tercapainya indikator tersebut adalah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, dan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Indikator Nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat didukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Aktivitas yang dilakukan untuk pencapaian indikator adalah administrasi keuangan, kepegawaian dan perencanaan.

Beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung program di Disdagperinaker tahun 2023 tercantum pada gambar di berikut.



Gambar 3.5 Pelatihan Berbasis Kompetensi Pembuatan Roti dan Kue



Gambar 3.6 Pelatihan Berbasis Kompetensi Tata Kecantikan Rambut



Gambar 3.7 Tera/ Tera ulang UTTP Ukur Takar Timbang dan Peralatannya di SPBU



Gambar 3.8 Pelatihan Peningkatan Produktivitas Pelintingan dan Blending Sigaret Kretek Tangan



Gambar 3. 9 Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi penggunaan anggaran pada tahun 2023 tercantum pada tabel berikut

Tabel 3. 9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
	<i>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</i>			
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro.	10.000.000	8.750.000	87,5
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
	<i>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>			
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	3.060.540.500	2.989.338.900	97,67
	<i>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>			
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.	30.000.000	29.520.000	98,4
	<i>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</i>			
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi.	2.000.000	1.805.000	90,25
	<i>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</i>			
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil.	1.000.000	964.800	96,48
	<i>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.	1.000.000	987.400	98,74
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
	<i>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan	25.000.000	24.237.500	96,95

	antar Kerja.			
	Pelayanan antar Kerja.	8.000.000	7.882.000	98,53
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja.	12.000.000	11.653.000	97,11
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.	30.000.000	29.840.000	99,47
	<i>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</i>			
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.	30.000.000	29.158.000	97,19
	<i>Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI).	12.000.000	12.000.000	100
	<i>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	8.000.000	7.762.000	97,025
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.	15.000.000	14.864.500	99,09
	<i>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	55.000.000	53.369.500	97,04
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	25.000.000	22.906.800	91,63
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.	100.000.000	95.385.000	95,39
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.	10.000.000	9.340.000	93,4
5	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
	<i>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</i>			
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15.726.700	13,205,450	83,96

	Penerbitan Tanda Daftar Gudang			
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	5.856.700	5,840,500	99,72
6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	71.000.000	69.306.000	97,61
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	508.854.000	508.201.750	99,98
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	40.000.000	39.979.150	99,95
7	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12.441.500	10,633,500	85,46
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	7.651.700	7,584,200	99,11
8	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	16.961.100	15.796.848	93,14
9	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	42.736.000	40,475,904	94,71
10	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	409.404.000	404.616.000	98,83
11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.	614.600.200	602.553.175	98,04

12	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	15.000.000	14.511.000	96,74
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	24.000.000	23.995.000	99,88
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	4.000.000,00	4.000.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	3.000.000,00	2.970.000	99,00

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	1.985.000	99,25
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000,00	1.955.000	98,75
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	4.950.000	99,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.640.183.705	9.882.592.025	92,87
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000	9.664.000	96,64
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.000.000	7.953.300	99,42
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	6.457.000		
	Pengolahan Data Retribusi Daerah	4.003.000	3.947.800	98,62
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	62.400.000	62.288.000	99,82
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	153.035.000	149.627.600	97,77

	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	14.998.500	99,99
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.920.000	17.913.000	99,96
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	349.500.000	338.851.300	96,95

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	90.000.000	89.223.000	99,14
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	226.370.000	224.619.867	99,23
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.600.000	2.530.000	97,31
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.000.000	3.000.000	100
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	525.000.000	485.919.000	92,56
	Pengadaan Mebel	20.000.000	19.832.000	99,16
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.100.000	116.325.000	98,50
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000.000	4.783.114.675	79,72
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	37.440.000	93,60

	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	361.300.000	337.567.962	93,43
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.497.800.000	3.520.722.500	100,66
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	227.363.900	215.553.600	94,81
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.080.000	42.710.000	99,14
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	152.632.000,00	142.986.300	93,68
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	243.671.000	242.948.200	99,70

Total anggaran Disdagperinaker Tahun 2023 untuk semua program yang mendukung tujuan dan sasaran strategis adalah Rp 28.269.305.605, - (Dua puluh delapan milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus lima ribu enam ratus lima rupiah). Serapan anggaran sebesar Rp. 26.001.408.987,- (Dua puluh enam milyar satu juta empat ratus delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), atau sebesar 92%. Efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.167.896.618,- (Dua milyar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah), atau sebesar 8%.

3.3 Pendapatan Asli Daerah

Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan asli daerah melalui retribusi. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Target pendapatan retribusi Disdagperinaker tahun 2023 adalah Rp. 3.475.457.000, - (Tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp. 3.631.022.634,- (Tiga milyar enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat rupiah). Capaian sebesar 104.48% atau kategori sangat baik.

Pendapatan retribusi diperoleh dari sumber-sumber berikut ini.

1. Retribusi jasa umum berupa pelayanan persampahan/ kebersihan
2. Retribusi pelayanan tera/ tera ulang berupa pengujian alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya
3. Retribusi pelayanan pasar, berupa retribusi pelataran (PKL) dan retribusi kios.
4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa retribusi Penyewaan tanah dan bangunan (MCK, Rusunawa, sewa tanah)
5. Retribusi tempat parkir khusus
6. Retribusi perijinan tertentu berupa Retribusi pemberian perpanjangan ijin memperkerjakan TKA (IMTA) kepada pemberi kerja TKA.
7. Hasil bangun guna serah berupa Palur Plaza

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Hasil pengukuran kinerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2023, meliputi 4 (empat) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator sebagai berikut.

1. Capaian kinerja > 100% kategori “sangat baik” sebanyak 5 (lima) indikator sasaran, yaitu Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, persentase pasar dalam kondisi baik, persentase retribusi pada PAD, pertumbuhan PDRB sektor perindustrian, dan pertumbuhan industri kecil menengah
2. Capaian kinerja 85% - 100% kategori “baik” sebanyak 3 (tiga) indikator sasaran, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Rasio Angkatan Kerja yang bekerja, nilai SAKIP, nilai IKM

4.2 Rekomendasi/ Tindak Lanjut Permasalahan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar direview oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Berdasarkan hasil review, maka rekomendasi yang ditetapkan dan tindak lanjut yang dilakukan adalah.

1. Dokumen Perencanaan Kinerja agar dipublikasikan tepat waktu
Tindak lanjut telah mempublikasikan dokumen perencanaan pada web resmi Disdagperinaker.
2. Memperbaiki target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja
Tindak lanjut memperbaiki target pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan PDRB Sektor Industri pengolahan karena adanya perkembangan ekonomi pasca covid
3. Memperbaiki rumusan hasil tujuan sasaran agar jelas menggambarkan kondisi kinerja yang dicapai
Tindak lanjut menetapkan rumusan penghitungan indikator.
4. Melaksanakan rapat koordinasi pembahasan perumusan Definisi Operasional atas kinerja dan cara mengukur indikator
Tindak lanjut adalah telah melaksanakan rapat koordinasi untuk menetapkan target indikator tujuan dan sasaran strategis.